



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHSIN DZUL QURNAIN
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA
3. NHK : 209458

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.250.000.000

1. Tanah Seluas 29 m2 di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KOTA SEMARANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/60 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/130 m2 di KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 633.400.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR PCX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 29.400.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOBIL, HONDA CRV 1.5 TURBO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
6. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



120.000.000

7. LAINNYA, GIANT SEPEDA ROAD BIKE Tahun 2015, HASIL

SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.050.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 46.242.113**F. HARTA LAINNYA** Rp. 100.000.000**Sub Total** Rp. 3.080.692.113**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.080.692.113

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.